



P U T U S A N
NOMOR 51/PDT/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUPARDI, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Nelayan, beralamat di Rt010Rw.003 Desa Sungai Duri Satu Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa Kepada AMIR SYARIFUDDIN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, di Jalan Natuna Rt.6Rw.03 Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 6/SK/LEG.PDT/2018/PN Mpw padatanggal 11 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai penerima Kuasa dari Penggugat;

Melawan

1. **DJAINADI Bin AMIR**, beralamat tempat tinggal di Rt.02Rw.08 Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula TERGUGAT I**;
2. **M. YUSWARDI AM Bin AMIR**, beralamat tempat tinggal di Rt.002Rw.001 Dusun Brojonalan Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula TERGUGAT II**;
3. **M. YANI (Mantan Pj. Kepala Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah)**, beralamat tempat tinggal di Dusun Mayasari Rt.03Rw.01 Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula TERGUGAT III**;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH**, beralamat di Jalan Daeng Manambon Nomor 12 Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

Hal 1 dari 11 hal putusan Nomor 51 /PDT/2018/PT PTK



Dalam hal ini Turut Tergugat memberikan Kuasa Kepada 1.Solihin, A.Ptnh Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, 2.Kartini Elisabet Purba, S.H., M.Kn, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, 3. Imam Asbullah, Staf Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 19/SK/LEG.PDT/2018/PN Mpw pada tanggal 1 Februari 2018, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 51/PDT/2018/PT PTK tanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
3. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 4/Pdt.G/2018/PN Mpw tanggal 3 Juli 2018.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2018 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 11 Januari 2018 di bawah Register perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mpw, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat, dengan mengemukakan alasan – alasan dan dasar – dasar gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** memiliki sebidang tanah sawah yang letaknya pada saat ini di Dusun Suka Tani Rt. 008/Rw. 002 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan luas $\pm 8.946 \text{ m}^2$ (panjang 213 m dan lebar 42 m) dengan batas-batas:
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. FATTAH;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah HALIMAH Binti KUNCANG;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah IBRAHIM;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PAK ACONG;
2. Bahwa tanah sawah tersebut di atas **Penggugat** mendapatkan dari peninggalan orang tua laki-lakinya bernama HIDAYAT Bin KUNCANG, yang

Hal 2 dari 11 hal putusan Nomor 51 /PDT/2018/PT PTK



mana tanah sawah tersebut dahulunya digarap oleh orang tua laki-laki **Penggugat** bersama-sama dengan kedua orang tuanya bernama **KUNCANG Bin H. AHMAD** dan istrinya bernama **SAKDAH Binti LADJIM** menggarap sawah tersebut sejak tahun 1948, yang kemudian setelah **KUNCANG Bin H. AHMAD** dan **SAKDAH Binti LADJIM** meninggal dunia yang menggarap dan menguasai tanah sawah tersebut adalah orang tua laki-laki **Penggugat** Hidayat Bin **KUNCANG** dan setelah **Hidayat Bin KUNCANG** meninggal dunia, yang menguasai dan merawat tanah sawah tersebut adalah **Penggugat** dengan persetujuan dari seluruh ahli waris / anak-anak kandung dari **Hidayat Bin KUNCANG** yaitu : 1. **BUJANG Hidayat**, 2. **RAHIMAH**, 3. **ARDEN Hidayat**, 4. **SUPARDI** dan 5. **SUPRIADI**;

3. Bahwa **KUNCANG Bin H. AHMAD** telah meninggal dunia demikian juga dengan **SAKDAH Binti LADJIM** yang dari perkawinannya mempunyai 5 orang anak yaitu:

- 1) Almarhum **BASIRON Bin KUNCANG**;
- 2) Almarhumah **HALIMAH Binti KUNCANG**;
- 3) Almarhum **Hidayat Bin KUNCANG**;
- 4) Almarhumah **RAMNAH Binti KUNCANG**;
- 5) **ASNAH Binti KUNCANG**;

4. Bahwa menurut **Penggugat** tanah sawah tersebut di atas adalah bagian dari warisan **KUNCANG Bin H. AHMAD** dan **SAKDAH Binti LADJIM** yang kemudian sekarang ini dikuasai oleh **Penggugat**, sedangkan **HALIMAH Binti KUNCANG** saudara perempuan orang tua laki-laki **Penggugat** mendapat warisan dari kedua orang tuanya di sebelah Timur tanah **Penggugat**;

5. Bahwa **Penggugat** mengenai surat-surat kepemilikan dari asal yaitu kepemilikan semasa **KUNCANG Bin H. AHMAD** dan **SAKDAH Binti LADJIM** dan semasa orang tua laki-lakinya **Hidayat Bin KUNCANG** telah hilang tetapi banyak saksi yang mengetahui memang tanah terperkara ini adalah milik **Hidayat Bin KUNCANG** yang kemudian juga kenyataannya sampai sekarang tanah sawah tersebut menurut **Penggugat** tetap dikuasai oleh **Penggugat**;

6. Bahwa **Penggugat** mendapat keterangan dari bibinya yaitu saudara perempuan **Hidayat Bin KUNCANG** yaitu **ASNAH Binti KUNCANG** dan anak **ASNAH Binti KUNCANG** yang bernama **ASNI MAJID** yang mengatakan kepada **Penggugat** mengenai surat-surat kepemilikan tanah orang tua **Penggugat** yaitu **Hidayat Bin KUNCANG** dan kepemilikan kakek dan nenek **Penggugat** yaitu **KUNCANG** dan **SAKDAH** ada dengan



TergugatI di Pontianak, mendengar hal tersebut, **Penggugat** pada tanggal 20 Mei 2017 mendatangi **TergugatI** di Pontianak menanyakan perihal surat-surat kepemilikan tanah tersebut di atas;

7. Bahwa **Tergugat I** sewaktu **Penggugat** menanyakan surat-surat kepemilikan tanah tersebut di atas, **TergugatI** menjawab bahwa surat-surat asli sudah terbakar yaitu surat kepemilikan KUNCANG dan SAKDAH dan juga menurut **TergugatI** ada lagi surat penyerahan dari KUNCANG dan SAKDAH atau tertulis dalam surat SAKDAH dan KUNCANG menyerahkan tanah sawah kepada ibu **TergugatI** yang bernama HALIMAH Bin KUNCANG juga sudah terbakar;
8. Bahwa mengenai surat penyerahan antara SAKDAH dan KUNCANG kepada HALIMAH Bin KUNCANG tertanggal 1 Mei 1982 menurut **Penggugat** sangat tidak jelas tidak menyebutkan letak tanah maupun batas-batasnya serta HALIMAH Binti KUNCANG sebenarnya sudah ada tanahnya di sebelah Timur tanah terperkara, tetapi menurut **Tergugat I** seluruh tanah milik SAKDAH dan KUNCANG yang luasnya lebih dari 8.000 m² yang diserahkan kepada HALIMAH Binti KUNCANG;
9. Bahwa dengan hal tersebut **Penggugat** sangat keberatan karena surat penyerahan tertanggal 1 Mei 1982 tersebut di atas tidak jelas di mana letak tanahnya dan tidak ada surat aslinya dan isinya tidak jelas yang bertanda tangan sebenarnya 2 orang yaitu SAKDAH Bin LADJIM dan KUNCANG H. AHMAD tetapi yang bercap jempol hanya 1 orang sehingga tidak jelas karena hanya berupa fotocopy;
10. Bahwa kemudian **TergugatI** mengatakan kepada **Penggugat** ada surat penyerahan tanah antara Ibu **TergugatI** yaitu HALIMAH Binti KUNCANG kepada **TergugatI** tertanggal 15 Januari 1983 dengan isi surat penyerahan tidak menyebutkan ukuran panjang lebarnya dan tidak jelas batas-batasnya karena tidak sesuai dengan gambar lokasi tanah milik SAKDAH dan KUNCANG yang menyebutkan luasnya kurang lebih 1 rentang yang tidak bisa dipastikan berapa meter persegi dalam ukuran, dan surat tersebut tanda tangan dari **TergugatI** sangat berbeda dengan tanda tangan yang tertulis dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari **TergugatI**, dan menurut **Penggugat** memang ada tanah milik ibu dari **TergugatI** adalah yang berada di sebelah Timur dari tanah **Penggugat**, dan juga ibu dari **TergugatI** pernah berdiam di tanah sebelah Timur dari tanah **Penggugat**, dan ibu dari **TergugatI** adalah saudara perempuan dari orang tua laki-laki **Penggugat** yang bernama HIDAYAT Bin KUNCANG;



11. Bahwa **Tergugat I** yaitu adik kandung dari **Tergugat I** pada tanggal 20 Juni 2017 membuat Surat Pernyataan Pengakuan Tanah di bawah tangan yang menyatakan telah menguasai tanah dari warisan HALIMAH Bin KUNCANG tetapi tidak menjelaskan batas-batas tanah warisan tersebut dan hanya menyatakan surat penyerahan tanggal 1 Mei 1982 aslinya telah terbakar dan kemudian **Tergugat II** melapor ke polisi atas nama **Tergugat I** yang melaporkan **Penggugat** merebut tanah warisan HALIMAH tetapi tidak melampirkan gambar lokasi tanah dan batas-batasnya tidak jelas;
12. Bahwa **Penggugat** telah menjelaskan di Kantor Polisi mengenai kepemilikannya atas tanah sawah milik **Penggugat** tersebut di atas dan **Penggugat** merasa yakin bahwa tanah sawah tersebut di atas adalah miliknya yang berasal dari peninggalan orang tua laki-lakinya karena dari tahun 1948 tanah sawah tersebut telah ikut digarap oleh orang tua laki-lakinya dan dilanjutkan oleh **Penggugat**;
13. Bahwa **Penggugat** sangat keberatan atas perbuatan **Tergugat II** yang telah melaporkan kepada juru ukur dari Kantor **Turut Tergugat** yang mana pada saat mengukur untuk pemetaan pengadaan tanah pembangunan pelabuhan Kijing pada awal November 2017 yang mengatakan kepada juru ukur bahwa tanah milik **Penggugat** dimasukkan oleh **Tergugat II** dalam peta atas nama HALIMAH Binti BUJANG;
14. Bahwa tanah milik **Penggugat** yang didapat dari orang tua laki-lakinya bernama HIDAYAT Bin KUNCANG adalah termasuk yang ditunjukkan oleh **Tergugat II** kepada petugas juru ukur, sedangkan tanah HALIMAH Binti KUNCANG bukan HALIMAH Binti BUJANG yaitu saudara perempuan dari HIDAYAT Bin KUNCANG adalah bagian Timur dari tanah HIDAYAT Bin KUNCANG yang mana tanah milik HIDAYAT Bin KUNCANG dikuasai oleh **Penggugat** selaku anaknya sendiri, sehingga **Tergugat II** bermaksud ingin menguasai tanah milik **Penggugat**;
15. Bahwa **Penggugat** sangat merasa keberatan atas **Turut Tergugat** yang telah membuat daftar kepemilikan tanah di Desa Sungai Bundung dan membuat pemilik tanah milik **Penggugat** adalah nama **Tergugat II** (M. Yuswardi AM Cs) yang mana daftar tersebut ditanda tangani oleh Ketua Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B dari Kantor **Turut Tergugat**;
16. Bahwa Pihak **Penggugat** menanyakan kepada Kepala Desa Sungai Bundung dari data kepemilikan tanah yang dibuat oleh **Turut Tergugat**, menurut Kepala Desa Sungai Bundung surat pernyataan tanah yang diatasnamakan **Tergugat II** tersebut (M. Yuswardi AM Cs) untuk nomor register suratnya di desa adalah bukan surat pernyataan tanah milik

Hal 5 dari 11 hal putusan Nomor 51 /PDT/2018/PT PTK



TergugatII tetapi milik orang lain dengan letak RT yang berbeda dan luas tanah yang berbeda;

17. Bahwa **Tergugat II** telah membuat surat pernyataan tanah atas nama **Tergugat II** berikut 4 orang lainnya yaitu dalam surat pernyataan tanah nama DJAINADI Bin AMIR, MURTIKA Binti AMIR, M. YUSWARDI Bin AMIR (**Tergugat II**), SUGITO Bin AMIR dan JOHANI Binti AMIR dengan luas 7.805 m² lokasi di Rt. 08 Dusun Suka Tani Rt. 008/Rw. 002 Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit mengatasnamakan tanah di atas tanah milik **Penggugat** dan surat tersebut tidak termasuk dalam buku agenda untuk register surat di Kantor Desa Sungai Bundung Kec. Sungai Kunyit, karena nomor surat tersebut adalah nomor register : 593.5/220/PEM/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang ditandatangani oleh **Tergugat III**, sedangkan nomor surat tersebut yang ada di agenda desa adalah nomor 593.5/220/PEM/20117 tanggal 6 Juli 2017 adalah atas nama NURHASANAH SAPARI. MA dengan luas 1460 m² dengan lokasi di Rt. 05 bukan di Rt. 08, sehingga menurut **Penggugat** surat pernyataan tanah milik **Tergugat II** tersebut adalah dibuat dengan mengada-ada dan ingin menguasai tanah milik **Penggugat**;

18. Bahwa **Penggugat** sangat merasa keberatan atas perbuatan **TergugatI** dan **TergugatII** tersebut di atas dan **Penggugat** mengajukan gugatan mengenai kepemilikan tanah sawah yang dimilikinya dan **Penggugat** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mempawah agar sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Suka Tani Rt. 008/Rw. 002 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan luas ±8.946 m² (panjang 213 m dan lebar 42 m) dengan batas-batas:

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. FATTAH;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah HALIMAH Binti KUNCANG;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah IBRAHIM;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PAK ACONG;

Dinyatakan milik **Penggugat**

19. Bahwa **Penggugat** karena kehilangan dari surat-surat kepemilikan dengan hal tersebut **Penggugat** telah membuat surat pernyataan tanah di Kantor Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit pada tanggal 30 Mei 2017 dengan diketahui oleh pejabat kepala desa Sungai Bundung Laut dan disaksikan oleh 3 orang saksi dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan untuk menyatakan surat tersebut sah secara hukum;

20. Bahwa surat penyerahan tanah milik **TergugatI** tertanggal 15 Januari 1983 dikarenakan tidak jelas ukuran panjang dan lebarnya dan batas-batasnya dan tanda tangan **TergugatI** dalam surat penyerahan sangat berbeda

Hal 6 dari 11hal putusan Nomor 51 /PDT/2018/PT PTK



dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk **TergugatI** dan tidak sesuai dengan batas-batas tanah milik **Penggugat** dengan ini memohon agar dinyatakan tidak berkekuatan hukum atas tanah **Penggugat**;

21. Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Tanah milik **TergugatII** karena dibuat secara di bawah tangan dan surat tersebut berdasarkan surat-surat fotocopy sehingga mohon dinyatakan tidak sah secara hukum;
22. Bahwa hasil pemetaan untuk tanah **Penggugat** yang dilaporkan oleh **TergugatII** kepada **Turut Tergugat** dengan atas nama HALIMAH Binti BUJANG adalah tidak benar dan mohon dinyatakan tidak sah secara hukum.
23. Bahwa mengenai surat pernyataan Tanah milik Tergugat II dan 4 orang lainnya (satu buah surat) atas nama Djainadi Bin Amir (Tergugat I), Murtika Binti Amir, M. Yuswardi Bin Amir (Tergugat II), Sugito Bin Amir (Almarhum), Johani Binti Amir (Almarhumah) dengan luas tanah ± 7.805 m² dengan nomor Register Desa 593.5/220/PEM/2017 tanggal 3 Juli 2017, karena tidak terdaftar di desa dan telah mengatasnamakan tanah diatas tanah milik Peggugat dengan ini mohon dinyatakan tidak sah secara hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yang **Penggugat** uraikan tersebut di atas dengan ini **Penggugat** mohon kiranya Pengadilan Negeri Mempawah berkenan menerima gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah sawah yang terletak di Dusun Suka Tani Rt. 008/Rw. 002 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan luas ± 8.946 m² (panjang 213 m dan lebar 42 m) dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. FATTAH;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah HALIMAH Binti KUNCANG;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah IBRAHIM;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PAK ACONG.Adalah milik **Penggugat**;
3. Menyatakan surat pernyataan atas nama SUPARDI dalam hal ini **Penggugat** tertanggal 30 Mei 2017 dengan nomor register: 593.5/75/PEM/2017 tanggal 30 Mei 2017 sah secara hukum;
4. Menyatakan Surat Penyerahan milik **TergugatI** tertanggal 15 Januari 1983 tidak berkekuatan hukum atas tanah milik **Penggugat**;
5. Menyatakan Surat Pengakuan Tanah milik **TergugatII** yang dibuat di bawah tangan tertanggal 20 Juni 2017 tidak sah secara hukum;

Hal 7 dari 11hal putusan Nomor 51 /PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hasil pemetaan untuk pengadaan tanah Pembangunan Pelabuhan Kijing untuk tanah atas nama HALIMAH Binti BUJANG tidak sah secara hukum;
7. Menyatakan daftar nama kepemilikan tanah yang dibuat oleh **Turut Tergugat** atas nama **Tergugat II** (M. YUSWARDI AM Cs) di atas tanah **Penggugat** tidak sah secara hukum;
8. Menyatakan surat pernyataan tanah atas nama **Tergugat II** dan 4 (empat) orang lainnya (satu buah surat) atas nama Jainadi Bin Amir (Tergugat I), Murtika Binti Amir, M.Yuswardi Bin Amir (Tergugat II), Sugito Bin Amir (Almarhumah), Johani Binti Amir (Almarhumah dengan luas tanah \pm 7.805 m² dengan Nomor Register Desa 593.5/220/PEM/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang ditandatangani oleh **Tergugat III** tidak sah secara hukum;
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.
ATAU: Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Juli 2018 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.672.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah Akta pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, Penggugat melalui kuasanya yang bernama **AMIR SYARIFUDDIN, S.H.**, Advokat berkantor di Jalan Natuna Rt.6Rw.03 Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2018, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN Mpw tanggal 3 Juli 2018 tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, Jurusita Pengadilan Negeri Mungkid dan Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 17 Juli 2018, tanggal 11 Juli 2018, tanggal 6 Juli 2018 dan tanggal 12 Juli 2018 kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula

Hal 8 dari 11hal putusan Nomor 51 /PDT/2018/PT PTK



TergugatII, Terbanding III semula Tergugat III dan turut terbanding semula turut Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut .

3. Memori banding tertanggal 17 Juli 2018, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah, tanggal 17 Juli 2018, dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Kuasa Hukum TerbandingI pada tanggal 25 Juli 2018, kepada Terbanding II pada tanggal 24 Juli 2018, kepada Terbanding III dan turut terbanding pada tanggal 18 Juli 2018.
4. Kontra memori bandingtertanggal 25 Juli 2018, yang diajukan oleh M.YUSWARDI AM Bin AMIR, S.H. yang beralamat di RT. 002 RW. 001 Dusun Brojonalan Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Jawa Tengah, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 31 Juli 2018, dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya Kuasa Pembanding pada tanggal 1 Agustus 2018, Terbanding I pada tanggal 7 Agustus 2018, Terbanding III pada tanggal 1 Agustus 2018, Turut Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2018
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak dan Jurusita Pengadilan Negeri Mungkit ,yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 25 Juli 2018, tanggal 24 Juli 2018 dan tanggal 18 Juli 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 14 (empat belas hari) setelah waktu pemberitahuan inisebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembandingdahulu Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurutcara yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mpw tanggal 3 Juli 2018, memori banding tanggal 17 Juli 2018 dan kontra memori banding para terbanding tanggal 25 Juli 2018, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga bisa diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding dan Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Hal 9 dari 11hal putusan Nomor 51 /PDT/2018/PT PTK



Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding memuat alasan - alasan yaitu :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah keliru mempertimbangkan bukti surat Pembanding yakni P.1 berupa Surat Pernyataan Tanah oleh Supardi tanggal 30 Mei 2017 yang dibatalkan oleh Tergugat III pada tanggal 20 Juli 2017;
2. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan saksi-saksi Pembanding yaitu saksi Buniwan, saksi Sulaiman dan saksi A. Rahim yang kesemuanya telah diambil keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari para Terbanding memuat alasan bahwa Pembanding seharusnya memiliki data konkrit asal usul surat - surat tanah untuk membuat Surat Pernyataan Tanah;

Menimbang bahwa terhadap alasan – alasan memori banding dan kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkannya. Adapun yang ingin ditambahkan oleh Majelis Hakim Banding dalam perkara a quo yang belum atau tidak dipertimbangkan sebelumnya ialah keterangan - keterangan dari 2 (dua) orang saksi Penggugat dari Berita Acara Pemeriksaan saksi di persidangan yaitu saksi Buniwan dan saksi A. Rahim;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Banding bahwa keterangan - keterangan dari kedua orang saksi Penggugat tersebut malahan tidak mendukung dalil- dalil gugatan itu sendiri karena kedua saksi tersebut dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yakni menurut saksi Buniwan bahwa yang tinggal diatas tanah tersebut pada tahun 1980 adalah Halimah bersama Mustika. Sedangkan menurut saksi A. Rahim bahwa pemilik tanah tersebut adalah Bu Halimah yang merupakan ibu dari Yuswardi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding telah cukup bukti dari 2 (dua) orang saksi bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Halimah yang merupakan ibu dari Yuswardi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding/Penggugat haruslah ditolak dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding /Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Hal 10 dari 11 hal putusan Nomor 51 /PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding dahulu Penggugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mpw, tanggal 3 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.0000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh kami H. SUNARYO WIRYO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, HARTOMO, SH dan BARITA SARAGIH, SH., LLM. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor51/PDT/2018/PT PTK, tanggal 4 September 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 4 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta DJAMIATUL ICHWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

HARTOMO, SH.

Ttd

BARITA SARAGIH, SH., LLM..

KETUA MAJELIS,

Ttd

H.SUNARYO WIRYO, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DJAMIATUL ICHWAN, SH.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r i a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s iRp. 5.000,-
- P e m b e r k a s a nRp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11hal putusan Nomor 51 /PDT/2018/PT PTK